

Pernyataan Publik
**TRAGEDI KEMANUSIAAN DI YAHUKIMO:
SERUAN UNTUK MENGHENTIKAN KEKERASAN DI TANAH PAPUA**

JPIC OFM Papua, dengan penuh keprihatinan menyampaikan pernyataan terkait peristiwa tragis yang terjadi di Distrik Anggruk, Yahukimo. Berdasarkan informasi yang telah diverifikasi, dari tujuh orang yang menjadi korban serangan oleh kelompok bersenjata, satu orang atas nama Rosalia Sogen telah meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka dengan kondisi yang bervariasi. Selain itu, informasi terbaru dari Bandara Advent Sentani menyebutkan bahwa terdapat total delapan korban yang telah berhasil dievakuasi ke RS Bhayangkara Jayapura, dengan satu di antaranya meninggal dunia.

Kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan, tanpa memandang siapa pelakunya, yang mengancam hak hidup, terutama terhadap warga sipil seperti guru dan tenaga medis yang menjalankan tugas mulia mereka di tengah kondisi sulit. Kekerasan seperti ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Kami menyerukan penghentian segera atas siklus kekerasan yang terus berlangsung di Tanah Papua.

Tindakan pembunuhan seperti ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Namun, kami juga menyadari bahwa akar permasalahan dari konflik yang berkepanjangan ini jauh lebih dalam, meliputi sejarah ketidakadilan, marginalisasi, dan ketegangan yang terus meningkat akibat militerisasi dan pendekatan keamanan yang konfrontatif.

Akar Permasalahan

Konflik ini kembali menunjukkan akar permasalahan yang kompleks di Papua, yang melibatkan:

1. Siklus militerisasi: Penambahan pasukan non-organik ke wilayah ini sering kali memicu ketegangan lebih lanjut.
2. Saling curiga: Persepsi bahwa pekerja sipil adalah bagian dari operasi militer memperburuk kepercayaan masyarakat.
3. Kurangnya dialog damai: Pendekatan yang mengutamakan keamanan sering kali mengesampingkan solusi yang berbasis pada rekonsiliasi.

Solusi yang Diajukan

JPIC OFM Papua menyerukan langkah-langkah berikut:

1. Pengakuan Papua sebagai Kawasan Berkonflik Non Internasional (KBNI). Pemerintah Indonesia perlu secara resmi mengakui Papua sebagai kawasan konflik, sehingga dasar hukum yang lebih jelas dapat digunakan untuk melindungi warga sipil dan mengatur operasi militer..
2. Penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Berlaku bagi semua pihak, HHI akan memastikan perlindungan terhadap warga sipil dan memungkinkan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.

3. Dialog Inklusif dan Berkelanjutan. Pemerintah, TNI-Polri, TPNPB-OPM, serta tokoh adat dan agama harus bekerja sama untuk membuka ruang dialog damai demi rekonsiliasi jangka panjang.
4. Pendekatan Berbasis Kemanusiaan. Guru, tenaga medis, dan pekerja sipil lainnya harus dipandang sebagai pelayan masyarakat, bukan mata-mata. Pemerintah harus memastikan keselamatan mereka, serta memberikan dukungan kemanusiaan kepada korban kekerasan.
5. Transparansi dan Reformasi Sektor Keamanan. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap operasi militer di Papua dan memastikan akuntabilitas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.

Seruan kepada Semua Pihak

Kami menyerukan kepada pemerintah, militer, TPNPB-OPM, tokoh agama, dan adat untuk:

- Menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil.
- Mendukung proses evakuasi dan pemulihan korban yang saat ini dirawat di Jayapura.
- Memulai langkah konkret menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Kami memohon kepada semua pihak untuk menghormati hak asasi manusia dan bekerja sama dalam semangat persaudaraan. Perdamaian hanya dapat terwujud jika kita berani meletakkan senjata dan merangkul dialog. Namun, ini membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk menghentikan kekerasan, menghormati kehidupan, dan bekerja sama dalam semangat persaudaraan.

Jayapura, 23 Maret 2025



Alexandro Rangga OFM
Direktur JPIC OFM Papua